

# **Hubungan Negara dan Agama**

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas Individu

**Mata Kuliah:**

Hukum Tata Negara

**Dosen Pengampu:**

Dr. Eko Hidayat S.Sos, Mh



Disusun Oleh:

Kelompok 10

Ananda Nabilla Ibtisammah 22210202218

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

**2024**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah yang berjudul “Hubungan Negara dan Agama” ini dapat tersusun hingga selesai. Dengan selesainya makalah ini, kami sebagai penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah membantu proses penyusunan makalah ini.

Dengan harapan kami semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca, untuk kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi makalah agar menjadi lebih baik lagi. Karena keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman kami. Kami yakin masih banyak kekurangan dalam makalah ini, oleh karena itu, kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini.

Bandar Lampung, 14 Maret 2024

Kelompok 10

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1. Latar Belakang .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB II ISI .....</b>	<b>7</b>
<b>2.1. Sejarah Hubungan Agama dan Negara di Indonesia.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2. Dinamika Politik dan Sosial di Indonesia .....</b>	<b>8</b>
<b>2.3. Partisipasi dan Peran Umat Islam .....</b>	<b>10</b>
<b>2.4. Konsep Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam Islam.....</b>	<b>12</b>
<b>2.5. Dampak Dinamika Hubungan Agama dan Negara Terhadap Kehidupan Islam</b>	<b>14</b>
<b>2.6. Peran Lembaga Keagamaan dalam Kehidupan Politik dan Sosial .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>25</b>
<b>3.1. Kesimpulan dan Saran.....</b>	<b>25</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>27</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 'agama' merujuk kepada ajaran dan sistem yang mengatur kepercayaan dan ibadah kepada Tuhan Yang Mahakuasa, serta kaidah yang berkaitan dengan interaksi manusia dan lingkungannya. Sementara itu, 'negara' di KBBI didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi di wilayahnya, diakui dan dihormati oleh rakyat, dengan struktur politik dan pemerintahan yang efektif, serta memiliki kedaulatan untuk menetapkan tujuan nasional.<sup>1</sup>

Dari definisi KBBI tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat tiga area di mana agama dan negara memiliki titik persinggungan. Pertama, dalam hal kekuasaan, agama memiliki koneksi dengan kekuasaan Tuhan sementara negara memiliki kekuasaan atas kedaulatan dan legitimasi. Kedua, dalam hal hubungan antara sesama manusia, agama memberikan tuntunan dalam interaksi manusia dan dengan lingkungan, sementara negara mengatur kehidupan sosial melalui kekuasaannya. Ketiga, dalam hal hukum, baik agama maupun negara memiliki ajaran atau peraturan yang harus diikuti oleh masyarakat. Jika hukum yang dibuat oleh negara sejalan dengan ajaran agama, maka ini dapat menciptakan sinergi positif antara agama dan negara, tetapi jika bertentangan, dapat menimbulkan polemik antara keduanya.<sup>2</sup>

Perbincangan mengenai agama dan negara di Indonesia memegang peranan penting dalam konteks sosial masyarakat, terutama dalam sejarah politiknya. Pada era awal Orde Baru, gerakan Islam sering dianggap sebagai gerakan yang ekstrem, fanatik, dan puritan,

---

<sup>1</sup> Muhammad Anang Firdaus, "*Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya*", 2014, Hal.3

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal.4

yang dianggap mengancam fondasi negara Indonesia. Pengalaman sejarah juga menunjukkan bahwa, dalam periode sebelumnya, seperti pada masa Orde Lama, terdapat dorongan dari kalangan politisi Islam untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta.

Pergeseran dari era enam puluhan ke tujuh puluhan mencerminkan dinamika perjuangan yang terjadi, di mana gagasan modernisasi ekonomi dan politik menjadi pusat perhatian dalam transisi ke Orde Baru. Masa tersebut menjadi babak penting, di mana modernisasi diidentifikasi dengan upaya mengurangi pengaruh agama, terutama Islam, dalam kehidupan politik. Kecenderungan pemerintahan pada periode tersebut menandai restrukturisasi politik yang bertujuan untuk menekan peran politik masyarakat guna menjaga stabilitas, dengan sistem politik yang semakin didominasi oleh kekuatan militer dan partai-partai yang diakomodasi dalam dua partai besar. Selain itu, reproduksi elit politik dan manipulasi politik menjadi ciri khas pemerintahan tersebut.<sup>3</sup>

Respons dari kalangan intelektual Muslim terhadap arah kebijakan pemerintah Orde Baru terfokus pada dua aspek utama: pertama, ketidakpuasan terhadap pembatasan ruang politik bagi Islam, dan kedua, penolakan terhadap gagasan modernisasi yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Modernisasi membawa umat Islam ke dalam posisi resistensi dan kurang terlibat secara signifikan dalam perubahan sosial-politik, sehingga menimbulkan ketegangan antara umat Islam dengan kekuatan negara yang lebih mengedepankan hegemoni dan kestabilan politik.

Fenomena tersebut menjadi perhatian para intelektual Muslim, yang meresponsnya dengan menjelaskan pentingnya dan keharusan untuk memberikan penjelasan konseptual tentang relevansi kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam Islam<sup>4</sup>. Dari

---

<sup>3</sup> Muhammad Fuad Fathul Majid, Hasman Zhafiri Muhammad, "*Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia*", 2023, Hal.5, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

<sup>4</sup> Muhammad Imadudin, "*Hubungan Agama dan Negara: Dialektik dan Dinamika Antara Paradigma*", 2023, Hal. 90, Published in INDEPENDEN: Jurnal Politik

pemahaman ini, muncul fokus pada pentingnya menjembatani perbedaan antara massa Muslim dan kekuatan negara, serta memperkuat dialog dan wacana tentang bagaimana Islam dapat berkontribusi dalam konteks kebangsaan dan demokrasi.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia, khususnya dalam konteks perkembangan politik dan sosial, serta dampaknya terhadap partisipasi dan peran umat Islam dalam kehidupan politik dan masyarakat ?
2. Apa pengaruh dinamika hubungan antara agama dan negara terhadap kebijakan publik yang memengaruhi kehidupan umat Islam di Indonesia ?
3. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap interaksi antara agama dan negara dalam membentuk kebijakan yang memengaruhi kehidupan umat Islam ?

## BAB II

### ISI

#### 2.1. Sejarah Hubungan Agama dan Negara di Indonesia

Sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia memiliki landasan yang kaya dan kompleks, yang tercermin dalam perjalanan panjang negara ini sejak zaman pra-kolonial hingga masa kini. Pada masa pra-kolonial, agama, terutama Islam, Hindu-Buddha, dan kepercayaan animisme, memiliki peran penting dalam pembentukan struktur sosial, politik, dan budaya di berbagai wilayah Nusantara. Misalnya, keberadaan kerajaan Islam seperti Demak, Aceh, dan Majapahit menunjukkan integrasi kuat antara agama dan kekuasaan politik.<sup>5</sup>

Kedatangan kolonial Belanda membawa perubahan signifikan dalam dinamika hubungan agama dan negara di Indonesia. Pemerintahan kolonial tersebut cenderung memisahkan agama dari urusan politik dan memperkenalkan sistem hukum yang berbasis pada hukum Barat. Meskipun demikian, agama tetap memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat, baik sebagai sumber identitas maupun sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan.<sup>6</sup>

Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 membawa harapan baru dalam hubungan agama dan negara. Pancasila sebagai dasar negara mencerminkan semangat inklusifitas yang mengakui keberagaman agama dan keyakinan. Meskipun begitu, implementasi hubungan agama dan negara tidak selalu mulus, terutama karena tekanan dari berbagai kelompok dan fraksi yang ingin memperjuangkan kepentingan agama tertentu.

---

<sup>5</sup> Dr. A. Bakir Ihsan, Dr. Cucu Nurkhayati, "*Agama Negara Masyarakat*", 2020, Hal.7

<sup>6</sup> *Ibid*, Hal. 9

Periode Orde Baru (1966-1998) menjadi fase yang menarik dalam sejarah hubungan agama dan negara di Indonesia. Pemerintahan Orde Baru, di bawah kepemimpinan Soeharto, menegaskan ideologi Pancasila sebagai dasar negara, tetapi juga membatasi ruang gerak organisasi keagamaan yang dianggap mengancam stabilitas politik. Di sisi lain, pemerintah juga memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi kekuasaan, terutama dalam konteks politik identitas.

Pergeseran politik pasca-Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam hubungan agama dan negara di Indonesia. Demokratisasi membuka ruang lebih luas bagi partisipasi politik berbagai kelompok agama dan mengakui hak-hak sipil serta kebebasan beragama secara lebih inklusif. Meskipun demikian, tantangan baru muncul dalam mempertahankan keseimbangan antara kebebasan beragama dan prinsip-prinsip demokrasi dengan memastikan tidak terjadi penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik sempit.<sup>7</sup>

## **2.2. Dinamika Politik dan Sosial di Indonesia**

Dinamika politik dan sosial di Indonesia tercermin dalam perjalanan panjangnya sejak masa pra-kemerdekaan hingga masa kini. Pada era pra-kemerdekaan, dinamika politik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perlawanan terhadap penjajahan kolonial Belanda. Gerakan politik yang dipimpin oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno dan Hatta, serta organisasi-organisasi massa seperti Budi Utomo dan Sarekat Islam, menjadi tonggak awal dalam pembentukan kesadaran nasional dan persiapan menuju kemerdekaan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hal. 10

<sup>8</sup> Umarwan Sutopo, Achmad Hasan Basri, "*Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*", 2023, Hal.56, Published in *Al-Syakhsyiah: Journal of law*



Setelah meraih kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial, termasuk upaya konsolidasi negara, pembangunan ekonomi, dan penegakan hukum. Periode ini juga ditandai dengan konflik internal antara kelompok politik yang berbeda pandangan, yang mencerminkan dinamika pluralisme politik yang menjadi ciri khas demokrasi Indonesia.

Masa Orde Baru (1966-1998) menandai periode politik yang ditandai oleh otoritarianisme dan pembatasan kebebasan sipil. Pemerintahan Soeharto menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, namun juga dikenal karena praktik korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan represi terhadap oposisi politik. Dinamika politik di masa ini dipengaruhi oleh kekuasaan militer dan partai politik yang didominasi oleh rezim Orde Baru.<sup>9</sup>

Pergeseran politik pasca-Reformasi pada tahun 1998 membawa perubahan yang signifikan dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia. Reformasi politik membuka ruang bagi partisipasi politik yang lebih inklusif, termasuk peningkatan peran masyarakat sipil, media, dan organisasi non-pemerintah. Demokratisasi juga memicu munculnya berbagai kelompok kepentingan baru dan dinamika politik yang lebih pluralistik.

Namun, tantangan-tantangan politik dan sosial masih terus ada di Indonesia. Isu-isu seperti korupsi, ketimpangan ekonomi, intoleransi, dan konflik horizontal terus menjadi fokus perhatian dalam dinamika politik dan sosial. Pemerintah dan masyarakat terus berupaya untuk menanggapi tantangan ini melalui reformasi kelembagaan, penguatan demokrasi, dan promosi hak asasi manusia, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip kebhinekaan dan persatuan nasional sebagai landasan negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal. 58

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 63

### 2.3. Partisipasi dan Peran Umat Islam

Partisipasi dan peran umat Islam di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik dan sosial negara ini. Sebagai agama mayoritas, umat Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya. Berikut adalah beberapa aspek penting terkait partisipasi dan peran umat Islam di Indonesia:<sup>11</sup>

#### 1. Politik Identitas

Umat Islam di Indonesia sering kali teridentifikasi dengan identitas politik yang kuat. Partai-partai politik Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), memiliki basis massa yang besar dan memainkan peran penting dalam politik Indonesia. Partisipasi politik umat Islam tercermin dalam jumlah kursi yang mereka raih dalam lembaga legislatif, serta dalam dukungan terhadap calon presiden atau kepala pemerintahan yang dianggap mewakili nilai-nilai Islam.

#### 2. Aktivisme Sosial

Selain dalam bidang politik, umat Islam juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial, seperti lembaga amal, yayasan pendidikan, dan kegiatan kemanusiaan. Organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia dan berperan dalam menyediakan layanan sosial bagi masyarakat, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan.

#### 3. Pendidikan dan Dakwah

---

<sup>11</sup> Shidqi Ahyani, "*Relasi Agama dan Negara Di Indonesia*", 2023, Hal.103

Umat Islam juga berperan dalam menyebarkan ajaran agama dan nilai-nilai Islam melalui lembaga-lembaga pendidikan dan dakwah. Sekolah-sekolah Islam, pesantren, dan majelis taklim menjadi sarana utama untuk penyebaran ilmu agama dan pembentukan karakter umat Islam. Selain itu, para ulama dan kyai juga memainkan peran penting dalam memberikan panduan dan fatwa kepada umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

#### 4. Kontribusi Ekonomi

Umat Islam juga memiliki peran dalam sektor ekonomi Indonesia. Banyak pengusaha Muslim yang aktif dalam berbagai bidang industri, perdagangan, dan jasa. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, dan sedekah, juga menjadi bagian dari praktik ekonomi umat Islam di Indonesia dan berkontribusi dalam redistribusi kekayaan dan bantuan kepada yang membutuhkan.

#### 5. Pemberdayaan Perempuan

Peran perempuan dalam masyarakat Islam juga semakin diakui dan diperkuat di Indonesia. Meskipun masih ada tantangan terkait kesetaraan gender, banyak organisasi Islam yang memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberdayakan mereka melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan advokasi hak-hak perempuan.

#### 6. Dialog Antaragama

Umat Islam juga terlibat dalam dialog antaragama untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Berbagai forum dan kegiatan dialog antaragama diadakan secara rutin untuk membangun pemahaman dan mengatasi konflik antarumat beragama.

#### 7. Kontribusi terhadap Pembangunan Bangsa

Secara keseluruhan, partisipasi dan peran umat Islam di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan bangsa. Dengan berbagai kegiatan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, umat Islam turut serta dalam membangun Indonesia menjadi negara yang lebih adil, makmur, dan beradab.

Dengan demikian, partisipasi dan peran umat Islam di Indonesia tidak hanya penting dalam konteks keberagaman sosial dan budaya, tetapi juga merupakan bagian integral dari dinamika politik dan sosial negara ini.<sup>12</sup>

#### **2.4. Konsep Kebangsaan, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia dalam Islam**

Konsep kebangsaan, demokrasi, dan hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip yang relevan dengan tatanan sosial dan politik yang adil serta inklusif. Dalam Islam, konsep kebangsaan berakar pada ajaran-ajaran yang menekankan persatuan, solidaritas, dan keadilan di antara umat manusia tanpa memandang perbedaan etnis, budaya, atau agama. Prinsip-prinsip ini terwujud dalam konsep ummah, yang mengacu pada komunitas Muslim yang bersatu dalam tujuan dan nilai-nilai yang sama. Dalam konteks kebangsaan, konsep ini dapat diterjemahkan menjadi semangat persatuan dan kesatuan dalam membangun negara yang berlandaskan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.

Demokrasi dalam Islam mencakup prinsip-prinsip partisipasi, konsultasi, dan akuntabilitas yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Prinsip musyawarah dan syura (konsultasi) dianggap sebagai bagian integral dari pengambilan keputusan dalam Islam, di mana para pemimpin dan otoritas publik diharapkan untuk mendengarkan dan memperhatikan pendapat serta kepentingan umat. Dengan demikian, demokrasi dalam Islam bukan

---

<sup>12</sup> *Ibid*, Hal.106

sekadar tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Hak asasi manusia (HAM) dalam Islam mencakup prinsip-prinsip universalitas, keadilan, dan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Islam mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak yang diberikan oleh Allah dan harus dihormati dan dilindungi oleh negara dan masyarakat. Hak-hak tersebut termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, keadilan, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Di samping itu, Islam juga menekankan pentingnya kewajiban sosial, seperti memberikan zakat (sumbangan wajib), infaq (sumbangan sukarela), dan sedekah untuk membantu mereka yang membutuhkan.<sup>13</sup>

Dalam konteks kebangsaan, demokrasi, dan HAM, Islam juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Islam harus memastikan distribusi kekayaan yang adil, perlindungan terhadap hak-hak rakyat, dan penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Selain itu, Islam juga menolak segala bentuk penindasan, ketidakadilan, dan korupsi dalam pemerintahan dan masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam prakteknya, konsep kebangsaan, demokrasi, dan HAM dalam Islam dapat diwujudkan melalui pembentukan lembaga-lembaga pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, serta adopsi kebijakan-kebijakan yang mempromosikan persamaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Selain itu, pendidikan dan advokasi mengenai nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kebangsaan, demokrasi,

---

<sup>13</sup> Abdurrahman Wahid, *"Mengurai Hubungan Agama dan Negara"*, 1999, Hal.134

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 137

dan HAM juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban mereka dalam membangun negara yang adil dan beradab.

## **2.5. Dampak Dinamika Hubungan Agama dan Negara Terhadap Kehidupan Umat Islam**

Pengaruh dinamika hubungan antara agama dan negara terhadap kehidupan umat Islam di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kebebasan beragama, pendidikan, kebijakan publik, dan ekonomi. Perkembangan politik dan sosial di Indonesia telah mempengaruhi secara langsung bagaimana agama dan negara saling berinteraksi, yang pada gilirannya memengaruhi kehidupan sehari-hari umat Islam di negara ini. Dalam subbab ini, kita akan mengeksplorasi lebih lanjut dampak-dampak tersebut, mulai dari pengaruh terhadap kebebasan beragama dan hak-hak minoritas agama, hingga implikasi dalam kebijakan pendidikan, pembentukan hukum, dan kebijakan publik yang memengaruhi masyarakat Muslim. Selain itu, kita juga akan mengkaji dampak ekonomi dari kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama, yang dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.<sup>15</sup>

### **A. Pengaruh Terhadap Kebebasan Beragama Dan Hak-Hak Minoritas Agama Di Indonesia**

Pengaruh dinamika hubungan antara agama dan negara terhadap kebebasan beragama dan hak-hak minoritas agama di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan sensitif. Secara konstitusional, Indonesia menjamin kebebasan beragama untuk semua warga negara. Namun, dalam praktiknya, faktor-faktor seperti tekanan politik, ketidakseimbangan kekuasaan, dan

---

<sup>15</sup> Muhammad Danial, "*RELASI AGAMA DAN NEGARA*", 2021, Hal.85

intoleransi agama sering kali membatasi pelaksanaan hak tersebut. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama, terutama terhadap minoritas agama seperti Kristen, Hindu, dan Buddha.

Salah satu dampak yang paling terasa adalah terjadinya diskriminasi terhadap minoritas agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hak untuk membangun tempat ibadah, mengakses layanan publik, dan bahkan dalam dunia kerja. Serangan terhadap rumah ibadah minoritas dan tindakan kekerasan verbal maupun fisik terhadap umat beragama minoritas sering kali terjadi, mengancam kebebasan beragama dan merusak kerukunan antarumat beragama.

Selain itu, peraturan-peraturan yang mengatur pengakuan dan perlindungan terhadap agama minoritas juga masih belum memadai. Banyak kasus di mana negara tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap minoritas agama, bahkan mengabaikan hak-hak mereka dalam beribadah dan melaksanakan praktik keagamaan mereka.<sup>16</sup>

Selain itu, terdapat juga kekhawatiran terkait dengan penegakan hukum terhadap kasus intoleransi agama. Sering kali, penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap kebebasan beragama kurang efektif, dan kasus-kasus intoleransi agama sering kali tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh pihak berwenang.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, Hal. 90

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 93

## B. Implikasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Dan Kurikulum Sekolah Terkait Dengan Agama

Implikasi dinamika hubungan antara agama dan negara terhadap kebijakan pendidikan dan kurikulum sekolah di Indonesia memiliki dampak yang signifikan dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. Pendidikan di Indonesia secara resmi diatur oleh negara dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai landasan kebijakan pendidikan nasional. Namun, keberagaman agama di Indonesia memunculkan tantangan tersendiri dalam penyusunan kurikulum yang merangkul semua keyakinan agama tanpa mendiskriminasi.

Pertama-tama, dalam implementasi kurikulum di sekolah-sekolah, terdapat kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara memperkenalkan nilai-nilai agama secara universal dan menghormati kebebasan beragama individu. Meskipun Pancasila menekankan pada nilai-nilai kebhinekaan dan persatuan, masih terdapat ketegangan antara aspek keagamaan dan pendidikan nasional yang merujuk pada prinsip sekularisme. Sebagai contoh, masalah sensitif seperti pelajaran agama di sekolah sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika terjadi ketidakseimbangan antara pengajaran agama mayoritas dengan minoritas.

Kedua, kurikulum pendidikan yang bersifat nasionalisme juga menghadapi tantangan dalam mengakomodasi keberagaman agama yang ada di Indonesia. Sementara nilai-nilai agama tertentu mungkin lebih dominan di beberapa daerah, pendidikan nasional harus mampu mencerminkan pluralitas agama yang ada secara adil dan seimbang. Ini melibatkan pengembangan



materi ajar yang menghargai dan mengakui berbagai tradisi keagamaan tanpa mengesampingkan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan bersama.

Selanjutnya, implikasi terhadap kebijakan pendidikan juga dapat dilihat dari aspek pengaturan lembaga pendidikan yang berbasis agama. Sekolah-sekolah yang didasarkan pada agama tertentu sering kali memiliki kurikulum yang lebih terfokus pada ajaran agama tersebut, yang dapat mempengaruhi pemahaman dan perspektif siswa terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pluralisme. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana pendidikan agama seharusnya memengaruhi pembentukan karakter dan sikap kewarganegaraan siswa.

Selain itu, perlu diperhatikan juga dalam pengelolaan dana pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah agama. Penggunaan dana yang tidak transparan atau terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya dapat merugikan tujuan pendidikan nasional yang inklusif dan merugikan siswa yang berasal dari minoritas agama.

#### C. Peran Agama Dalam Pembentukan Hukum Dan Kebijakan Publik Yang Berdampak Pada Masyarakat Muslim

Peran agama dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat Muslim memiliki relevansi yang penting dalam konteks Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Agama, terutama Islam, sering menjadi faktor penting dalam proses pembentukan kebijakan publik dan hukum di negara ini, mempengaruhi

berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang politik, ekonomi, dan sosial.<sup>18</sup>

Pertama-tama, agama, sebagai salah satu sumber nilai dan moral, sering kali menjadi landasan bagi pembentukan hukum dan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat Muslim. Nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan sosial, sering dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan undang-undang dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat Muslim dan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, peran agama juga tercermin dalam proses pembuatan undang-undang dan kebijakan publik yang secara khusus mengatur atau melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat Muslim. Contohnya adalah pembentukan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, warisan, pendidikan agama, dan perlindungan hak-hak minoritas agama. Agama menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan isi dan ruang lingkup undang-undang tersebut guna memastikan keadilan dan kesetaraan bagi umat Muslim.

Namun demikian, terdapat juga tantangan dalam penerapan peran agama dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik di Indonesia. Salah satunya adalah keragaman keyakinan agama di masyarakat, yang memunculkan perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap ajaran agama dalam konteks hukum dan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan antara pandangan agama yang beragam dan kepentingan umum dalam proses pembentukan hukum dan kebijakan.

---

<sup>18</sup> Mohamad Arief Kumaidi, "*Agama dalam Negara antara Teokrasi, Sekuler, dan Tamyiz*", 2021, Hal.2

Selain itu, dalam konteks negara demokratis, peran agama dalam pembentukan hukum dan kebijakan publik juga harus sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia. Agama tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk melanggar hak-hak individu atau kelompok, dan pembentukan hukum dan kebijakan harus memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, pluralisme, dan toleransi.

#### D. Dampak Ekonomi Dari Kenijakan Yang Didasarkan Pada Nilai-Nilai Agama

Dampak ekonomi dari kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama memiliki peran yang signifikan dalam konteks sosial dan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, seperti negara lainnya, nilai-nilai agama, terutama Islam, sering menjadi dasar untuk pembuatan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai agama dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap perekonomian, baik secara positif maupun negatif.

Pertama-tama, kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dapat memberikan arah dan panduan bagi pengambilan keputusan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan beretika. Misalnya, dalam Islam, terdapat prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Pembentukan kebijakan yang memperhatikan prinsip-prinsip ini dapat membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih stabil dan adil bagi semua pihak.

Namun demikian, kebijakan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai agama juga dapat menimbulkan kontroversi dan tantangan tersendiri. Salah satu dampak negatifnya adalah potensi terjadinya diskriminasi terhadap

kelompok minoritas atau non-Muslim dalam akses terhadap pasar dan sumber daya ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi.

Selain itu, kebijakan ekonomi yang terlalu terpaku pada nilai-nilai agama juga dapat menghambat inovasi dan perkembangan ekonomi yang lebih dinamis. Pembatasan terhadap praktik bisnis atau investasi tertentu berdasarkan pertimbangan agama dapat membatasi kemungkinan untuk menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang inovatif.

Di sisi lain, implementasi kebijakan ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai agama juga dapat memberikan manfaat dalam hal mempromosikan etos kerja, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam distribusi kekayaan. Dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam pengambilan keputusan ekonomi, kebijakan semacam ini dapat membantu membangun masyarakat yang lebih berbudaya dan bertanggung jawab secara sosial.

## **2.6. Peran Lembaga Keagamaan dalam Kehidupan Politik dan Sosial**

Dalam dinamika politik dan sosial di Indonesia, peran lembaga keagamaan menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan. Lebih dari sekadar tempat ibadah, lembaga keagamaan sering kali menjadi pusat pengorganisasian masyarakat, memainkan peran yang signifikan dalam membentuk opini dan nilai-nilai yang memengaruhi kehidupan politik dan sosial.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Muhammad Fuad Fathul Majid, Hasman Zhafiri Muhammad, "*Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia*", 2023, Hal.5, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia

#### A. Kontribusi Lembaga Keagamaan Dalam Pembentukan Opini Dan Pandangan Politik Umat Islam

Dalam politik dan sosial di Indonesia, lembaga keagamaan memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini dan pandangan politik umat Islam. Salah satu kontribusi utama lembaga keagamaan adalah dalam menyediakan platform untuk menyampaikan pesan-pesan agama yang dapat memengaruhi persepsi dan sikap politik umat Islam. Melalui khutbah Jumat, ceramah agama, dan kegiatan dakwah lainnya, lembaga keagamaan seringkali menjadi sumber utama informasi dan pemahaman tentang isu-isu politik yang relevan. Dengan demikian, mereka memiliki potensi besar untuk membentuk pandangan politik umat Islam.<sup>20</sup>

Selain itu, lembaga keagamaan juga berperan dalam membentuk sikap politik umat Islam melalui pendidikan agama. Sekolah-sekolah agama dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya seringkali menjadi tempat di mana nilai-nilai politik dan sosial disampaikan dan diterapkan dalam konteks ajaran agama. Para pemimpin agama, seperti ulama dan kyai, memainkan peran penting dalam menyampaikan pandangan politik mereka kepada umat Islam melalui pendidikan agama.<sup>21</sup>

Selanjutnya, lembaga keagamaan juga memberikan ruang bagi umat Islam untuk berdiskusi dan berdialog tentang isu-isu politik yang relevan. Majelis taklim, pengajian, dan forum-forum diskusi agama sering diadakan di masjid-masjid dan lembaga keagamaan lainnya, di mana umat Islam dapat bertukar

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hal. 9

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 11

pikiran tentang berbagai masalah politik dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, lembaga keagamaan tidak hanya menjadi tempat untuk mendapatkan informasi politik, tetapi juga tempat untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pembentukan opini politik.

Selain itu, lembaga keagamaan juga memberikan pandangan etis dan moral yang dapat memengaruhi sikap politik umat Islam. Ajaran agama seringkali menyediakan kerangka nilai yang digunakan umat Islam dalam mengevaluasi kebijakan politik dan perilaku pemimpin politik. Dengan memberikan panduan moral dan etis, lembaga keagamaan dapat membentuk sikap politik yang lebih bertanggung jawab dan berdasarkan nilai-nilai agama.

Terakhir, lembaga keagamaan juga dapat menjadi agen perubahan sosial dan politik. Melalui program-program kesejahteraan sosial, advokasi hak asasi manusia, dan partisipasi dalam gerakan sosial, lembaga keagamaan dapat membantu mendorong perubahan positif dalam tatanan politik dan sosial. Dengan demikian, kontribusi lembaga keagamaan dalam pembentukan opini dan pandangan politik umat Islam sangatlah signifikan dan tidak dapat diabaikan dalam analisis dinamika politik dan sosial di Indonesia.<sup>22</sup>

#### B. Partisipasi Lembaga Keagamaan Dalam Penyelesaian Konflik Sosial Dan Politik

Partisipasi lembaga keagamaan dalam penyelesaian konflik sosial dan politik memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika masyarakat. Salah satu cara utama di mana lembaga keagamaan berperan dalam penyelesaian

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hal. 12

konflik adalah melalui mediasi dan perdamaian.<sup>23</sup> Dengan memiliki otoritas moral yang kuat di kalangan umatnya, lembaga keagamaan sering kali dianggap sebagai mediator yang efektif dalam menengahi konflik antara berbagai pihak. Mereka menggunakan ajaran agama sebagai dasar untuk memfasilitasi dialog dan mencapai kesepakatan yang adil, sehingga membantu meredakan ketegangan dan menciptakan kedamaian.

Selain mediasi, lembaga keagamaan juga berperan dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai kemanusiaan dan empati. Dalam penyelesaian konflik, pemahaman tentang persamaan hak dan martabat setiap individu sangat penting. Lembaga keagamaan membawa ajaran-ajaran yang menekankan pentingnya menghormati dan merangkul perbedaan, sehingga membantu membangun kedamaian dan harmoni dalam masyarakat yang terpecah belah.

Selanjutnya, lembaga keagamaan juga terlibat dalam upaya pencegahan konflik dengan melakukan advokasi untuk keadilan sosial dan pemenuhan hak asasi manusia. Mereka mendorong pemerintah dan lembaga lainnya untuk mengimplementasikan kebijakan yang inklusif dan berpihak pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, lembaga keagamaan dapat menjadi suara yang kuat dalam memperjuangkan kedamaian dan keadilan.

Selanjutnya, lembaga keagamaan juga berperan dalam membangun rekonsiliasi dan rekonsolidasi pasca-konflik. Setelah konflik terjadi, lembaga keagamaan membantu memulihkan kerukunan antar kelompok dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hal. 13

menyelenggarakan program-program rekonsiliasi, dialog antaragama, dan pembangunan perdamaian. Mereka juga memfasilitasi proses penyembuhan trauma dan membangun kepercayaan kembali di antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.

Terakhir, lembaga keagamaan juga memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan kapasitas dan perdamaian berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan. Mereka menyediakan pelatihan tentang perdamaian, dialog antaragama, penyelesaian konflik, dan keterampilan komunikasi efektif kepada para pemimpin masyarakat dan aktivis lokal. Dengan meningkatkan kesadaran dan keterampilan dalam penyelesaian konflik, lembaga keagamaan membantu memperkuat fondasi perdamaian dan stabilitas sosial dalam jangka panjang.



## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan dan Saran**

Setelah melakukan analisis mendalam terhadap dinamika hubungan antara agama dan negara di Indonesia, serta dampaknya terhadap kehidupan politik, sosial, partisipasi, dan peran umat Islam, kami menyimpulkan bahwa hubungan ini memiliki implikasi yang signifikan dalam membentuk dinamika masyarakat Indonesia. Pertama, dinamika ini memengaruhi kebijakan publik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan umat Islam, baik dalam konteks politik maupun sosial. Kedua, persepsi masyarakat terhadap interaksi antara agama dan negara sangat beragam, tergantung pada latar belakang budaya, keyakinan, dan pengalaman individu. Beberapa masyarakat merasa bahwa hubungan antara agama dan negara harus lebih terintegrasi dalam proses pembuatan kebijakan, sementara yang lain mungkin lebih mendukung pemisahan yang jelas antara kedua entitas tersebut.

Berdasarkan analisis tersebut, kami memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memperhatikan dengan cermat dampak kebijakan publik terhadap umat Islam, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya memperhatikan kepentingan mayoritas, tetapi juga menghormati hak-hak minoritas agama.
2. Pentingnya memperkuat dialog antara pemerintah dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan publik yang berkaitan dengan agama, sehingga memungkinkan partisipasi aktif dan kontribusi positif dari berbagai pihak.

3. Diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerjasama antara agama dan negara dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.
4. Perlunya memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan umat Islam, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid, "Mengurai Hubungan Agama dan Negara", 1999, Hal.134
- Dimas Aldi Pangestu, A. Sudrajat, "Mohammad Natsir: Konsep Hubungan antara Negara dan Islam dalam Mosi Integral Natsir", 2020, Hal.19
- Dr. A. Bakir Ihsan, Dr. Cucu Nurkhayati, "Agama Negara Masyarakat", 2020, Hal.7
- Mohamad Arief Kumaiddi, "Agama dalam Negara antara Teokrasi, Sekuler, dan Tamyiz", 2021, Hal.2
- Muhammad Anang Firdaus, "Relasi Agama dan Negara: Telaah Historis dan Perkembangannya", 2014, Hal.3
- Muhammad Danial, "RELASI AGAMA DAN NEGARA", 2021, Hal.85
- Muhammad Fuad Fathul Majid, Hasman Zhafiri Muhammad, "Relasi Islam Dan Politik Dalam Sejarah Nasional Indonesia", 2023, Hal.5, Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
- Muhammad Imadudin, "Hubungan Agama dan Negara: Dialektik dan Dinamika Antara Paradigma", 2023, Hal. 90, Published in INDEPENDEN: Jurnal Politik
- Shidqi Ahyani, "Relasi Agama dan Negara Di Indonesia", 2023, Hal.103
- Umarwan Sutopo, Achmad Hasan Basri, "Menguak Relasi Agama dan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", 2023, Hal.56, Published in Al-Syakhsiyyah: Journal of law